

Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro

Fatrisia Agustina WM^{1*}, Daniati Ilahia², Desy Kurniawati³, M. Yusuf Bahtiar, M.E⁴

^{1,2,3,4}Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung

Abstrak

Stabilitas ekonomi makro menjadi pilar penting dalam menjaga kesejahteraan suatu negara, ditandai dengan inflasi yang terkendali, tingkat pengangguran rendah, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan stabilitas harga. Pemerintah dan otoritas moneter, melalui kebijakan fiskal dan moneter, berperan dalam menjaga stabilitas tersebut. Kebijakan fiskal mengatur pengeluaran dan penerimaan negara, sementara kebijakan moneter oleh Bank Indonesia berfokus pada pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga. Sinergi kedua kebijakan ini sangat penting, karena kebijakan fiskal yang ekspansif tanpa dukungan moneter yang sesuai bisa menyebabkan inflasi sementara kebijakan moneter yang ketat di masa resesi dapat memperburuk kontraksi ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research*. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendalami dan menganalisis peran kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung stabilitas ekonomi makro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan fiskal dan moneter terlihat signifikan terutama saat pandemi COVID-19, dengan stimulus fiskal dan penurunan suku bunga untuk menstabilkan ekonomi. Kebijakan yang telah diterapkan yaitu ketika ekonomi melemah, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang didukung oleh kebijakan moneter akomodatif, seperti suku bunga rendah untuk meningkatkan konsumsi dan investasi. Sebaliknya, saat inflasi tinggi, kebijakan fiskal ketat diimbangi dengan kebijakan moneter kontraktif dapat mengurangi permintaan agregat dan stabilitas harga. Keseimbangan ini sangat penting untuk mencapai tujuan ekonomi makro yang berkelanjutan, seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, dan tingkat pengangguran yang rendah.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, Stabilitas, Ekonomi Makro.

Abstract

Macroeconomic stability is a crucial pillar for maintaining a nation's well-being, characterized by controlled inflation, low unemployment, sustainable economic growth, and price stability. The government and monetary authorities play a vital role in upholding this stability through fiscal and monetary policies. Fiscal policy manages government expenditure and revenue, whereas monetary policy—conducted by Bank Indonesia—focuses on regulating the money supply and interest rates. Synergy between these two policies is essential; expansive fiscal policy without appropriate monetary support can trigger inflation, while tight monetary policy during a recession can exacerbate economic contraction. This study employs a qualitative methods utilizing library research approach. This approach was selected because the primary objective is to explore and analyze the roles of fiscal and monetary policies in supporting macroeconomic stability. The findings indicate that coordination between fiscal and monetary policies was particularly significant during the COVID-19 pandemic, involving fiscal stimulus and interest rate cuts to stabilize the economy. When the

ECONOMIE

economy weakens, the government implements expansive fiscal policy supported by accommodative monetary policy—such as low interest rates—to boost consumption and investment. Conversely, during periods of high inflation, a combination of tight fiscal policy and contractionary monetary policy can reduce aggregate demand and ensure price stability. Achieving this balance is critical for realizing sustainable macroeconomic goals, such as stable economic growth, controlled inflation, and low unemployment.

Keywords: Fiscal Policy, Monetary Policy, Stability, Macroeconomics.

Pendahuluan

Stabilitas ekonomi makro merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara secara keseluruhan (Zulaikah, 2024). Kondisi ini mencerminkan keseimbangan antara berbagai variabel ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan stabilitas nilai tukar. Ketika stabilitas ekonomi terjaga dengan baik, aktivitas ekonomi dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan. Sebaliknya, ketidakstabilan ekonomi dapat memicu berbagai permasalahan seperti krisis keuangan, penurunan investasi, serta meningkatnya ketimpangan sosial. Oleh karena itu, menjaga stabilitas ekonomi makro menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, peran pemerintah dan otoritas moneter menjadi sangat penting dalam mengelola perekonomian (Rahman & Sudirman, 2025). Kebijakan yang tepat dan terarah dapat membantu menjaga keseimbangan ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, stabilitas ekonomi juga berpengaruh terhadap kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan mendorong masuknya investasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan global yang semakin kompleks membuat upaya menjaga stabilitas ekonomi menjadi semakin sulit. Perubahan kondisi ekonomi global dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian domestik. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan tersebut. Dalam hal ini, kebijakan fiskal dan moneter menjadi instrumen utama yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi (Mutiar et al., 2024). Kedua kebijakan ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam mengendalikan berbagai indikator ekonomi makro. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah dalam mengelola perekonomian melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat memengaruhi tingkat permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Efektivitas kebijakan fiskal sangat ditentukan oleh ketepatan alokasi anggaran dan kemampuan pemerintah dalam mengelola defisit anggaran secara bijaksana (Mutiar et al., 2024).

ECONOMIE

Sementara itu, kebijakan moneter memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan nilai tukar. Otoritas moneter menggunakan berbagai instrumen seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengendalian jumlah uang beredar untuk memengaruhi aktivitas ekonomi. Kebijakan moneter yang tepat dapat menciptakan stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Latifah et al., 2025).

Dalam praktiknya, kebijakan fiskal dan moneter tidak dapat berjalan secara terpisah, melainkan harus saling melengkapi. Ketidakseimbangan antara kedua kebijakan ini dapat menimbulkan distorsi ekonomi, seperti inflasi yang tinggi atau perlambatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang efektif antara pemerintah dan otoritas moneter dalam merumuskan kebijakan ekonomi (Rahman & Sudirman, 2025).

Perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks memberikan tantangan besar bagi stabilitas ekonomi nasional. Globalisasi ekonomi menyebabkan keterkaitan yang erat antara satu negara dengan negara lainnya. Perubahan kondisi ekonomi di satu negara dapat memberikan dampak terhadap negara lain. Hal ini membuat perekonomian menjadi lebih rentan terhadap guncangan eksternal. Fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan moneter global, serta ketegangan geopolitik menjadi faktor utama yang memengaruhi stabilitas ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan fiskal dan moneter harus mampu beradaptasi dengan cepat. Respons kebijakan yang lambat dapat memperburuk kondisi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang responsif dan fleksibel. Pemerintah dan otoritas moneter harus mampu mengantisipasi berbagai risiko ekonomi. Selain itu, koordinasi kebijakan juga harus ditingkatkan. Dengan demikian, stabilitas ekonomi dapat tetap terjaga di tengah ketidakpastian global (Firdaus et al., 2025).

Pengalaman krisis ekonomi global menunjukkan pentingnya peran kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi. Krisis ekonomi dapat menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi secara drastis. Dalam kondisi tersebut, kebijakan fiskal digunakan untuk memberikan stimulus ekonomi. Pemerintah meningkatkan belanja negara untuk mendorong permintaan agregat. Di sisi lain, kebijakan moneter digunakan untuk menjaga likuiditas dalam perekonomian. Otoritas moneter menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi. Sinergi antara kedua kebijakan ini terbukti efektif dalam mengatasi krisis. Selain itu, kebijakan yang tepat juga dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Pengalaman ini menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan sangat penting. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan yang diambil dapat menjadi tidak efektif (Zulaikah, 2024). Oleh karena itu, pembelajaran dari krisis ekonomi harus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan ke depan.

ECONOMIE

Di Indonesia, kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, otoritas moneter bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan. Kedua kebijakan ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan kebijakan yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara kedua kebijakan ini. Selain itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan global. Dengan demikian, stabilitas ekonomi dapat terjaga secara optimal (Gulo & Efendi, 2024).

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter juga menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam kebijakan fiskal. Selain itu, tekanan inflasi juga menjadi tantangan dalam kebijakan moneter. Ketidakpastian global, seperti pandemi COVID-19 yang menghambat kegiatan ekonomi secara internasional, konflik antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan lonjakan harga energi dan makanan, serta peningkatan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat (*The Fed*) yang mengarah pada keluarnya modal dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, semakin memperumit keadaan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang dapat beradaptasi dengan baik agar pemerintah dan otoritas moneter dapat menyesuaikan langkah-langkah mereka dengan perubahan pada kondisi ekonomi. Pemerintah dan otoritas moneter perlu cepat dalam merespons perubahan yang terjadi. Selain itu, kebijakan yang diambil harus terarah dengan baik. Dengan cara ini, efektivitas kebijakan bisa meningkat (Rahman dan Sudirman, 2025).

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan cabang utama dalam ilmu ekonomi yang memfokuskan analisisnya pada aspek-aspek ekonomi suatu negara dalam skala besar. Ini meliputi studi tentang fenomena makroekonomi seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas mata uang. Analisis ekonomi makro juga mencakup pemahaman terhadap perilaku ekonomi secara agregat, yang meliputi output total atau produk domestik bruto (PDB), pendapatan nasional, tingkat pekerjaan, konsumsi masyarakat, investasi perusahaan, dan harga-harga secara keseluruhan dalam perekonomian. Pengkajian ekonomi makro mengarah pada pemahaman tentang bagaimana kebijakan pemerintah, baik itu kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, dapat memengaruhi variabel-variabel ekonomi ini dalam skala nasional atau regional yang luas. Misalnya, kebijakan fiskal yang ekspansif, seperti peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak, bisa merangsang

ECONOMIE

aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan, sementara kebijakan moneter yang ketat dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga (Mujasmara et al., 2023). Secara praktis, pemahaman yang mendalam tentang ekonomi makro memberikan panduan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi ekonomi yang efektif. Hal ini penting untuk mencapai tujuan-tujuan seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan tingkat pengangguran, stabilisasi harga-harga, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan demikian, studi ekonomi makro tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga memberikan dasar untuk perencanaan jangka panjang dalam upaya mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Mutiarra et al., 2024).

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan dan anggaran belanja negara. Pajak ini dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang ditimbulkan oleh aktivitas pemerintahan. Kebijakan fiskal merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro yang dipergunakan untuk mencapai target pembangunan. Fungsi kebijakan fiskal secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi penetapan target aturan, fungsi distribusi pendapatan serta subsidi, dan fungsi stabilisasi ekonomi. Fungsi alokasi aturan bertujuan untuk tujuan pembangunan ekonomi. Fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dimaksudkan untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa aturan pemerintah menjadi indera untuk memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian (Siswajanthi et al., 2024). Pemerintah membentuk kebijakan fiskal untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran serta pendapatan berbentuk pajak pemerintah. Kebijakan fiskal tidak sama dengan kebijakan moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat suku bunga serta jumlah uang tersebar. Instrumen utama kebijakan fiskal ialah pengeluaran serta pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak serta pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel mencakup permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya dan distribusi pendapatan. Pemerintah yang menjalankan kebijakan fiskal merupakan menggunakan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian atau dengan perkataan lain, memakai kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. dengan melalui kebijakan fiskal, diantaranya pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional (Gunawan, 2024).

3. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Pada dasarnya, kebijakan moneter ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang tepat sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Dalam perekonomian, beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk menilai kebijakan moneter antara lain jumlah uang beredar (money supply), inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, dan ekspektasi masyarakat. Suku bunga berpengaruh terhadap investasi sektor industri yang akan mendorong produksi. Sedangkan nilai tukar berpengaruh terhadap harga (produk dan input produksi). Suku bunga dan nilai tukar merupakan instrumen kebijakan moneter yang sangat mempengaruhi perdagangan produk industri baik domestik maupun internasional. Jika yang dilakukan adalah meningkatkan money supply, maka pemerintah dikatakan menempuh kebijakan moneter ekspansif. Sebaliknya jika money supply dikurangi, pemerintah menempuh kebijakan moneter kontraktif (Sukirno, 2012).

4. Stabilitas ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merujuk pada kondisi di mana perekonomian suatu negara beroperasi secara konsisten tanpa mengalami fluktuasi yang besar dan tidak stabil. Hal ini mencakup pengendalian inflasi yang moderat, tingkat pengangguran yang rendah, serta pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Stabilitas ini tidak hanya penting untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi, tetapi juga untuk mencapai tujuan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara lebih luas, serta untuk meningkatkan kepastian dan keamanan dalam investasi. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa naik secara signifikan dalam periode waktu yang singkat, mengakibatkan penurunan standar hidup dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi. Di sisi lain, pengangguran yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan sosial, karena berkurangnya lapangan kerja mempengaruhi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam konteks ini, stabilitas ekonomi makro menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Davoodi et al., 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research*. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendalami dan menganalisis peran kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung stabilitas ekonomi makro. Sumber data utama yang digunakan adalah literatur sekunder yang meliputi buku ilmiah, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, lembaga internasional, serta artikel berita dan opini terkait. Teknik pengumpulan data

ECONOMIE

dilakukan melalui studi literatur, yang mencakup tahap pencarian, identifikasi, pembacaan, pemahaman, pencatatan, dan analisis terhadap informasi yang relevan dari literatur yang telah teridentifikasi. Analisis data menggunakan teknik analisis konten, yang melibatkan pembacaan ulang literatur untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan kategori-kategori yang muncul dari literatur tersebut. Pendekatan dan teknik ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter dengan stabilitas ekonomi makro, serta memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan kebijakan di masa depan.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Indikator Makroekonomi Indonesia 2010-2023

Tahun	PDB Riil (Persen)	Inflasi (Persen)	Tingkat pengangguran terbuka (Persen)	Defisit Anggaran Negara (% PDB)	Suku Bunga PBI (persen)
2010	4,97	7,26	7,68	-2,21	5,61
2011	5,02	3,31	7,50	-2,07	5,71
2012	5,09	4,12	7,07	-1,76	5,88
2013	5,59	4,50	6,82	-1,73	6,03
2014	5,18	3,61	5,98	-1,89	7,50
2015	4,79	2,34	6,10	-2,38	7,59
2016	5,02	3,13	5,33	-2,09	5,19
2017	5,31	3,65	5,31	-2,03	4,50
2018	5,27	3,18	5,13	-2,08	5,50
2019	5,02	2,96	5,23	-2,07	6,10
2020	-2,09	1,62	6,27	-6,06	3,25
2021	3,69	1,96	6,36	-4,35	3,50
2022	5,39	2,38	5,33	-3,02	3,59
2023	5,13	3,21	5,28	-2,85	4,23

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indikator makroekonomi di atas dapat dipaparkan sebagai berikut: Pertumbuhan PDB Indonesia selama periode tersebut menunjukkan tren positif meskipun dengan fluktuasi. Pada tahun 2010-2013, 2017-2018, dan 2022, pertumbuhan PDB mencatatkan angka di atas 5%, didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat, investasi yang signifikan, dan kontribusi ekspor yang berarti.

ECONOMIE

Namun, pada 2014–2016 dan 2020, terjadi pertumbuhan negatif, khususnya pada tahun 2020 yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19.

Inflasi cenderung menurun sepanjang periode tersebut, kecuali pada tahun 2010 dan 2014 yang mencatatkan inflasi tinggi akibat kenaikan harga pangan. Kebijakan moneter Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga inflasi tetap stabil di bawah 5%, meskipun terjadi lonjakan inflasi pada tahun 2020 karena penurunan permintaan. Berikutnya, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan tren menurun secara umum, dengan puncaknya terjadi pada 2010 dan 2020. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kebijakan ketenagakerjaan menjadi faktor penurunan utama tingkat pengangguran, meskipun tantangan tetap ada dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Kemudian, data defisit anggaran negara mengalami fluktuasi signifikan, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2020 akibat penurunan pendapatan dan peningkatan pengeluaran untuk penanggulangan pandemi. Pemerintah berupaya keras untuk mengurangi defisit dengan konsolidasi fiskal dan peningkatan penerimaan negara. Suku bunga SPBI menurun secara konsisten dengan fluktuasi, mencerminkan kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.

Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia selama periode 2010-2023 menunjukkan ketahanan yang signifikan meskipun menghadapi tantangan seperti fluktuasi global dan dampak pandemi. Kebijakan yang responsif dan dukungan sektor-sektor utama seperti konsumsi, investasi, dan ekspor menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 2. Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia 2010-2023

Tahun	Pendapatan Negara	Belanja negara	Saldo Anggaran	Kebijakan	Catatan
2010	1.302,7	1.525,4	-222,7	Ekspansif	
2011	1.435,2	1.642,6	-207,4	Ekspansif	
2012	1.571,3	1.768,8	-197,5	Ekspansif	
2013	1.714,4	1.913,6	-199,2	Ekspansif	
2014	1.823,1	2.027,9	-204,8	Ekspansif	
2015	1.771,6	2.026,1	-254,5	Kontraktif	Penerapan kebijakan fiskal kontraktif ini dilakukan untuk menekan laju inflasi yang tinggi pada tahun 2015.

ECONOMIE

Tahun	Pendapatan Negara	Belanja negara	Saldo Anggaran	Kebijakan	Catatan
2016	1.822,9	2.031,6	-208,7	Kontraktif	Kebijakan fiskal kontraktif dilanjutkan di tahun 2016 untuk menjaga stabilitas ekonomi makro
2017	1.910,7	2.171,8	-261,1	Kontraktif	Kebijakan fiskal kontraktif masih diterapkan di tahun 2017 meskipun dengan fokus yang lebih pada efisiensi belanja negara
2018	1.977,8	2.200,7	-222,9	Kontraktif	Kebijakan fiskal kontraktif di tahun 2018 dilakukan dengan fokus pada pengurangan dan defisit anggaran negara.
2019	2.002,2	2.313,5	-311,3	Kontraktif	Kebijakan fiskal kontraktif masih diterapkan di tahun 2019 untuk menjaga stabilitas ekonomi
2020	1.722,3	2.616,0	-893,7	Ekspansif	Kebijakan fiskal ekspansif diterapkan di tahun 2020 sebagai respon terhadap pandemi COVID-19.
2021	1.405,8	2.771,5	-1.365,7	Ekspansif	Kebijakan fiskal ekspansif dilanjutkan di tahun 2021 untuk mendukung pemulihan

ECONOMIE

Tahun	Pendapatan Negara	Belanja negara	Saldo Anggaran	Kebijakan	Catatan
					ekonomi dari dampak pandemi COVID-19.
2022	1.917,7	2.750,7	-833,0	Ekspansif	Kebijakan fiskal ekspansif masih diterapkan di tahun 2022 meskipun dengan fokus yang lebih pada konsolidasi fiskal
2023	1.806,9	2.914,5	-1.107,6	Ekspansif	Kebijakan fiskal ekspansif di tahun 2023 dilakukan dengan fokus pada pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja

Sumber: Kementerian Keuangan 2010-2023

Tabel 3. Kebijakan Moneter tahun 2010-2023

Tahun	Inflasi (%)	Nilai Tukar Rupiah/USD (Rata-rata)	BI Rate / 7- Day <i>RR</i> <i>Rate</i> (%)	Jumlah Beredar dalam IDR	Uang (M2) Triliun
2010	7,26	9.088,00	5,61	2.243,3	
2011	3,31	8.770,00	5,71	2.649,7	
2012	4,12	9.670,00	5,88	3.091,5	
2013	4,50	10.460,00	6,03	3.474,3	
2014	3,61	11.878,00	7,50	3.920,1	
2015	2,34	13.795,00	7,59	4.246,5	

ECONOMIE

Tahun	Inflasi (%)	Nilai Tukar Rupiah/USD (Rata-rata)	BI Rate / 7- Day RR Rate (%)	Jumlah Beredar dalam IDR	Uang (M2) Triliun
2016	3,13	13.436,00	5,19	4.743,7	
2017	3,65	13.548,00	4,50	5.226,4	
2018	3,18	14.481,00	5,50	5.588,3	
2019	2,96	13.901,00	6,10	6.052,9	
2020	1,62	14.105,00	3,25	6.889,5	
2021	1,96	14.308,00	3,50	7.203,8	
2022	2,38	14.875,00	5,59	7.967,1	
2023	3,21	15.520,00	4,23	8.824,7	

Sumber: Badan Pusat Statistik 2010-2023

Berdasarkan table 3. di atas dapat kita lihat bahwa, Inflasi di Indonesia berfluktuasi dengan tingkat tertinggi di tahun 2010 (7,26%) dan menurun tajam di tahun-tahun berikutnya. Inflasi yang relatif terkendali sejak 2011 didorong oleh kebijakan moneter yang ketat dan pengendalian harga pangan. Namun, pada tahun 2023 inflasi cenderung meningkat sebesar (3,21%) yang mungkin dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global. Berikutnya Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memperlihatkan tren depresiasi atau pelemahan dari 9.088 rupiah per USD di tahun 2010 menjadi 15.520 rupiah di tahun 2023. Depresiasi ini terutama dipicu oleh ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, dan arus modal keluar dari negaranegara berkembang seperti Indonesia.

Suku bunga acuan Bank Indonesia, baik melalui BI Rate maupun *7-Day Reverse Repo Rate* (7-Day RR Rate), adalah instrumen utama untuk mengendalikan inflasi dan mendorong stabilitas nilai tukar. Pada awalnya, BI Rate berada di sekitar 5-6% di awal dekade, namun dinaikkan menjadi 7,50% di tahun 2014 seiring tekanan inflasi dan pelemahan rupiah. Suku bunga kemudian diturunkan kembali, terutama pada tahun 2020 hingga mencapai 3,25% untuk merangsang ekonomi di tengah pandemi COVID19. Adapun Jumlah uang beredar atau M2, meningkat signifikan dari tahun ke tahun, mulai dari Rp2.243,3 triliun pada 2010 hingga Rp8.824,7 triliun pada 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan moneter akomodatif dari Bank Indonesia, perkembangan sektor kredit, serta kebutuhan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi adalah kebijakan moneter akomodatif yaitu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan lebih banyak likuiditas (uang) dalam sistem

ECONOMIE

keuangan. Kebijakan ini biasanya diterapkan melalui penurunan suku bunga acuan, pelonggaran syarat kredit, atau pembelian aset seperti obligasi oleh bank sentral.

Table 4. Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Indikator Makroekonomi Indonesia

Indikator Makroekonomi		Dampak Kebijakan Fiskal
2010	PDB riil	Pertumbuhan PDB riil sebesar 4,97% didorong oleh kebijakan fiskal ekspansif pemerintah.
2011	Inflasi	Inflasi turun menjadi 3,31% setelah pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang lebih prudent.
2012	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 7,07% seiring dengan meningkatnya belanja pemerintah untuk infrastruktur dan program sosial.
2013	Defisit Anggaran Negara	Defisit anggaran negara turun menjadi -1,73% PDB setelah pemerintah melakukan penghematan anggaran.
2014	Suku Bunga SPBI	Suku bunga SPBI naik menjadi 7,50% akibat kebijakan fiskal yang lebih ketat untuk menekan inflasi.
2015	PDB riil	Pertumbuhan PDB riil melambat menjadi 4,79% di tengah pelemahan ekonomi global dan kebijakan fiskal yang kontraktif.
2016	Inflasi	Inflasi turun menjadi 3,13% setelah pemerintah kembali menerapkan kebijakan fiskal ekspansif.
2017	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,31% seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal yang akomodatif.
2018	Defisit Anggaran Negara	Defisit anggaran negara turun menjadi -2,08% PDB setelah pemerintah meningkatkan disiplin fiskal.
2019	Suku Bunga SPBI	Suku bunga SPBI turun menjadi 5,50% akibat kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

ECONOMIE

Indikator		Dampak Kebijakan Fiskal
Makroekonomi		
2020	PDB riil	Pertumbuhan PDB riil berkontraksi -2,09% akibat pandemi COVID-19 dan kebijakan fiskal yang fokus pada penanganan kesehatan dan pemulihan
2021	Inflasi	Inflasi turun menjadi 1,96% setelah pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendorong pemulihan ekonomi.
2022	Tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,33% seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal yang mendukung penciptaan lapangan kerja.
2023	Defisit Anggaran negara	Defisit anggaran negara turun menjadi -2,85% PDB setelah pemerintah melanjutkan konsolidasi fiskal.
2023	Suku Bunga SPBI	Suku bunga SPBI naik menjadi 4,23% akibat kebijakan fiskal yang lebih prudent untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Sumber: Bank Indonesia 2010-2023

Tabel di atas menjelaskan bagaimana kebijakan fiskal pemerintah Indonesia mempengaruhi indikator-indikator makroekonomi dari tahun 2010 hingga 2023. Berikut adalah analisis tahunan berdasarkan dampak kebijakan fiskal terhadap PDB, inflasi, tingkat pengangguran, defisit anggaran, dan suku bunga SPBI.

Pada tahun 2010 Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, yang mencakup peningkatan belanja untuk mendorong aktivitas ekonomi. Hasilnya, PDB riil tumbuh sebesar 4,97%, menandakan adanya peningkatan produksi barang dan jasa di Indonesia. Pada tahun 2011 Inflasi turun setelah pemerintah beralih ke kebijakan fiskal yang lebih prudent (hati-hati). Pengendalian belanja dan pengaturan alokasi anggaran menjaga tekanan inflasi agar tetap rendah, dengan hasil inflasi pada 3,31%. Kemudian tahun 2013 Pemerintah melakukan penghematan anggaran, menurunkan defisit anggaran menjadi -1,73% dari PDB. Langkah ini menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran negara untuk mengurangi beban utang.

Untuk menekan inflasi yang meningkat, pemerintah memperketat kebijakan fiskal, yang berdampak pada kenaikan suku bunga SPBI tahun 2014 menjadi 7,50%. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi pengeluaran berlebihan dan menjaga stabilitas harga. Pada tahun 2015 kebijakan

ECONOMIE

fiskal kontraktif diterapkan untuk mengurangi beban anggaran. Hal ini menyebabkan pertumbuhan PDB riil melambat menjadi 4,79%, mencerminkan penurunan aktivitas ekonomi akibat terbatasnya pengeluaran pemerintah. Pada tahun 2016 Pemerintah kembali menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, yang membantu menjaga inflasi tetap rendah di 3,13%. Peningkatan belanja mendorong permintaan barang dan jasa, namun terkendali untuk mencegah inflasi yang terlalu tinggi. Kemudian pada tahun 2017 Tingkat pengangguran turun menjadi 5,31% seiring perbaikan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal yang akomodatif, termasuk investasi pada proyek-proyek infrastruktur yang menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2018 Pemerintah meningkatkan disiplin fiskal, menekan defisit anggaran menjadi -2,08% dari PDB. Kebijakan ini mengurangi risiko ketidakstabilan fiskal, memastikan bahwa belanja negara tidak terlalu membebani anggaran. Pada tahun 2020 Pertumbuhan PDB mengalami kontraksi -2,09% akibat pandemi COVID-19, sementara kebijakan fiskal difokuskan pada penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi, termasuk subsidi dan stimulus untuk mengurangi dampak ekonomi. Pada tahun 2021 Inflasi turun menjadi 1,96% seiring kebijakan fiskal ekspansif pemerintah untuk pemulihan ekonomi. Peningkatan belanja mendorong permintaan secara bertahap namun terkendali, sehingga inflasi tetap rendah. Konsolidasi fiskal dilanjutkan dengan mengendalikan defisit anggaran menjadi -2,85% dari PDB. Pemerintah fokus pada stabilitas anggaran untuk menjaga kepercayaan investor dan mengurangi ketergantungan pada utang. Pada tahun 2023 Suku bunga SPBI dinaikkan menjadi 4,23% sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang lebih prudent, bertujuan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Analisis menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai indikator makroekonomi. Kebijakan fiskal ekspansif terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan PDB riil dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, namun perlu diimbangi dengan kebijakan fiskal yang prudent untuk menjaga stabilitas harga dan defisit anggaran negara. Secara keseluruhan, menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal Indonesia beradaptasi dengan kondisi ekonomi dan tantangan eksternal dari tahun ke tahun. Kebijakan fiskal yang ekspansif cenderung mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran, sementara kebijakan yang prudent dan kontraktif diterapkan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas anggaran.

Kebijakan fiskal, yang meliputi pengaturan belanja dan penerimaan negara, bertujuan untuk memengaruhi permintaan agregat dalam perekonomian. Ketika pemerintah meningkatkan belanja publik atau menurunkan pajak, efeknya dapat meningkatkan konsumsi dan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketika pemerintah mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak, permintaan agregat menurun, yang dapat membantu mengendalikan inflasi. Pada saat krisis, kebijakan fiskal ekspansif sering digunakan untuk mendukung ekonomi, seperti yang terlihat pada

ECONOMIE

pandemi COVID-19, ketika pemerintah banyak negara meningkatkan anggaran kesehatan dan memberikan stimulus untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Disisi lain penerapan Kebijakan moneter yang dikelola oleh bank sentral, yaitu mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mencapai stabilitas harga dan menjaga likuiditas. Dengan menurunkan suku bunga, bank sentral mendorong pinjaman dan investasi, meningkatkan permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kenaikan suku bunga menekan inflasi dengan mengurangi konsumsi dan investasi. Contoh nyata adalah saat Bank Indonesia menurunkan suku bunga selama pandemi Covid-19 untuk mengurangi dampak ekonomi dan mendukung pemulihan, serta menaikkannya kembali saat inflasi meningkat pada periode pemulihan ekonomi.

Dalam situasi normal, kebijakan fiskal dan moneter perlu sejalan untuk menjaga stabilitas ekonomi seperti:

1. **Pertumbuhan Ekonomi:** Untuk mendorong pertumbuhan, kebijakan fiskal ekspansif yang meningkatkan belanja pemerintah bisa dipadukan dengan kebijakan moneter akomodatif berupa suku bunga rendah. Keseimbangan ini dapat membantu meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
2. **Pengendalian Inflasi:** Ketika inflasi meningkat, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal yang lebih ketat (pengurangan belanja atau kenaikan pajak), didukung oleh kebijakan moneter kontraktif (kenaikan suku bunga). Langkah ini menurunkan permintaan agregat dan menjaga harga tetap stabil.

Tantangan muncul ketika kebijakan fiskal dan moneter tidak sejalan, misalnya ketika pemerintah meningkatkan belanja publik dalam situasi inflasi tinggi, sementara bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengendalikannya. Situasi ini dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi, meningkatkan biaya utang pemerintah, dan menurunkan efektivitas kedua kebijakan tersebut. Penting bagi pemerintah dan bank sentral untuk berkoordinasi dan memahami kondisi ekonomi yang tengah berlangsung agar kebijakan yang diterapkan selaras dan lebih efektif.

Bank Indonesia dan pemerintah berusaha menjaga keseimbangan melalui komunikasi dan koordinasi dalam penetapan kebijakan. Misalnya, pada 2020, Bank Indonesia menurunkan suku bunga dan meningkatkan likuiditas, sementara pemerintah mengalokasikan stimulus fiskal besar untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Koordinasi ini membantu menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan eksternal dan mempercepat pemulihan. Secara keseluruhan, keseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter adalah kunci untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi makro, seperti stabilitas harga, pertumbuhan berkelanjutan, dan penurunan pengangguran, terutama di masa-masa krisis maupun pemulihan ekonomi.

Kesimpulan

1) Kesimpulan

Kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, diantaranya:

1. Kebijakan fiskal yang dikelola oleh pemerintah, berfokus pada pengaturan belanja dan penerimaan negara untuk memengaruhi permintaan agregat. Kebijakan ini digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja publik atau insentif pajak, serta mengendalikan inflasi melalui penghematan anggaran atau pengurangan belanja.
2. Kebijakan moneter yang dikelola oleh bank sentral, mengontrol jumlah uang beredar dan suku bunga untuk menjaga stabilitas harga, mendorong investasi, dan menekan inflasi. Dalam kondisi ideal, kedua kebijakan ini sebaiknya bekerja selaras untuk memperkuat dampaknya terhadap ekonomi. Misalnya, ketika ekonomi melemah, kebijakan fiskal ekspansif sebaiknya didukung oleh kebijakan moneter yang akomodatif, seperti suku bunga rendah, untuk meningkatkan konsumsi dan investasi. Sebaliknya, saat inflasi tinggi, kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter kontraktif dapat mengurangi permintaan agregat dan stabilitas harga. Keseimbangan ini sangat penting untuk mencapai tujuan ekonomi makro yang berkelanjutan, seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, dan tingkat pengangguran yang rendah.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Davoodi, HR, dkk. (2021). *Stabilitas Makroekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi: Dinamika dan Faktor Penentunya*. Makalah Kerja IMF
- Firdaus, F., Wati, E., & Amalia, P. (2025). Analisis Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Mengendalikan Inflasi dan Stabilitas Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(3), 91–101. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i3.144>
- Gulo, R. R. F., & Efendi, B. (2024). Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Stabilitas Makroekonomi di Indonesia. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(1), 48-56. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i1.270>
- Gunawan. (2024). *Kebijakan Fiskal dan Transformasi Ekonomi Nasional*. Jakarta: Jurnal Kebijakan Fiskal Indonesia 2024
- Latifah, D., Febriani, L., & Dwilaga, S. A. (2025). Peran Kebijakan Moneter dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(6), 11147-11155

ECONOMIE

- Mujasmara, dkk. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Mempengaruhi Variabel Skala Ekonomi Nasional. *Jurnal Makroekonomi Indonesia*, 3(1), 45-58.
- Mutiara, A., Siregar, I. S., Chairani, M., Nur, L. M., Afriyanti, Y., & Nadilla, T. (2024). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Makro. *Kampus Akademik Publishing: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(7), 212-226. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1868>
- Rahman, S., & Sudirman. (2025). Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi. *IME: Inovasi Makro Ekonomi*, 7(1), 141-150
- Siswajanthi, dkk. (2024). Fungsi Strategi Kebijakan Fiskal: Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 98-110.
- Sukirno, S. (2012). *Makroekonomi: Teori Pengantar (Edisi ke-3)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Zulaikah, Z. (2024). Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro. *Journal of Mandalika Literature*, 6(1), 95–108. <https://doi.org/10.36312/jml.v6i1.3900>